

Pemikiran Dan Gerakan Politik Abu Bakar Ba'asyir

INDRA MARTIAN PERMANA¹

Abstrak

Pemikiran Politik Islam dalam sejarah Islam menjadi pergulatan pemikiran dan perdebatan yang panjang dan tidak pernah berhenti. Tidak adanya contoh baku dari Rasulullah SAW menjadikan politik menjadi dinamis dan berbeda antara para ulama dalam mengambil ijtihad politiknya. Sebagian berpendapat bahwa politik Islam harus berlandaskan kepada syariat islam secara keseluruhan dan tidak menerima bentuk selainnya sedangkan sebagian yang lainnya berpendapat bahwa politik Islam harus mengikuti perkembangan zaman, Abu Bakar Ba'asyir adalah salah satu dari sekian tokoh dan ulama yang berpendapat bahwa politik harus berlandaskan syariat islam dalam semua aplikasinya terkait konsep negara dan pemerintahan, konsep kepemimpinan, sehigga kemudian secara pasti menolak konsep demokrasi dan sekelurisme dan nasionalisme yang tidak sesuai syariat islam. Abu Bakar Ba'asyir lebih dikenal dengan tokoh terorisme, sebagian masa kehidupannya dihabiskan dalam penjara karena dugaan terlibat dengan aksi-aksi terorisme di Indonesia, sehingga menutup pemikiran dan konsep politik yang diyakininya untuk merubah tatanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan Abu Bakar Ba'asyir berusaha mewujudkan pemikiran politiknya melalui gerakan politik yang terdiri dari Dakwah, Jamaah, Nahi Munkar, Surat Diplomasi. Dan Jihad

Kata Kunci: *Pemikiran Politik, Terorisme, Abu Bakar Ba'asyir*

Pendahuluan

Pemikiran politik dalam islam lebih dikenal dengan istilah *siyasah syar'iyah*. Pembahasan terkait pemikiran politik islam selalu menarik karena menjadi pembelajaran terkait perbedaan para ulama dalam mengambil ijtihad. Tidak adanya contoh baku dari Rasulullah SAW terkait politik islam melahirkan konsep dan pemikiran politik yang berbeda-beda dari masa sahabat sampai sekarang. Tokoh-tokoh politik islam bermunculan Hasan Al Banna di Mesir dengan gerakan ikhwanul muslimin, Abu Ala Al Maududi di Pakistan dengan Tahrik-i Hijrah, sedangkan di Indonesia lahir gerakan politik Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dengan gerakan DI TII dan Muhammad Natsir dengan partai majelis syuro muslimin (Masyumi) yang kemudian melahirkan teori politik islam di Indonesia. Abu Bakar Ba'asyir adalah salah satu tokoh di Indonesia pada masa sekarang yang secara pemikiran memiliki konsep terkait pemikiran dan gerakan politik

Pemikiran Politik

Pandangan Tentang Konsep Negara dan Pemerintahan

Abu Bakar Ba'asyir menilai bahwa sebuah negara Islam harusnya menerapkan hukum Islam atau syariat Islam, Dalam pandangannya siapapun presiden atau kepala negaranya selama dia menerapkan hukum Islam maka dia termasuk kepala negara negara Islam.

Ba'asyir menganggap perlu syariat masuk ke dalam sistem kenegaraan karena hal ini merupakan suatu cara untuk menyelamatkan Islam itu sendiri dari serangan-serangan paham-paham sekuler. Menurutnya, Allah selain menurunkan Islam juga menurunkan sistem bagaimana cara mengamalkan dinul Islam, Dari pendapat ini dapat dipahami bahwa syariah merupakan hal yang wajib yang ada didalam sistem negara karena ini merupakan perintah dari Allah.

Wajib hukumnya bagi umat Islam dalam menjalankan syariat tidak hanya dalam kehidupan sosial melainkan di dalam lingkup kenegaraan. Untuk mengamalkan syariat Islam

¹ Penyelidik, Sekolah Tinggi Agama Islam PTDI. Fakultas Ilmu Dakwah, Kounikasi Penyiaran Islam STAI PTDI, Jl Tawes No 21-22 Tanjung Priuk Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia, 14310. Tel: +62 4390 7793, +62 435 7052. Email: indramartian@gmail.com

perlu kekuasaan politik (negara). Umat Islam wajib berjuang memprioritaskan berjalannya syariat Islam. Tegaknya syariat Islam akan memecahkan segala persoalan bangsa (Ba'asyir, 2001: 243).

Negara Islam dalam pemahaman Ba'asyir adalah negara yang dimana sistem kekuasaan yang dijalankan sesuai dengan syariat yang bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah. Penerapan syariat di dalam sistem kekuasaan ini telah diatur tata caranya oleh Allah melalui sumber hukum Islam yaitu Al Qur'an dan Sunnah seiring dengan diturunkannya agama Islam itu sendiri,

"...Jika kita membaca Qur'an dan hadits dapat saya simpulkan disamping Allah menurunkan Islam sebagai konsep hidup yang menyelamatkan (ummat) Allah Juga menurunkan sistem bagaimana cara mengamalkan Islam. Jadi, konsep dinul Islam itu baru bisa menemui sasarannya itu kalau cara mengamalkannya mengikuti sistem yang ditetapkan Allah" (Adidhatama, 2009: 88)

Dalam buku aqidah dan manhaj kami yang diterbitkan oleh team Sariyah Dakwah wal I'lam Jamaah Ansharut Tauhid dimana Abu Bakar Ba'asyir menjadi amirnya dikatakan:

"Kami berkeyakinan bahwa suatu negara itu apabila di sana berlaku hukum Islam dan penguasanya Muslim maka negara tersebut adalah negara Islam. Namun, apabila yang berlaku disana bukan hukum Islam atau sengaja memberlakukan didalamnya sebagian saja dari hukum Islam dan penguasanya kafir atau meengaku muslim (murtad) maka negara tersebut adalah negara kafir "(Dakwah JAT, 1434: 23-26)

"Kami berpendapat haram hukumnya bagi seorang muslim tinggal di negara kafir dan di tengah-tengah orang-orang musyrik, kecuali karena darurat. Allah Ta'ala berfirman:

"Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan Malaikat dalam Keadaan Menganiaya diri sendiri. (kepada mereka) Malaikat bertanya: "Dalam Keadaan bagaimana kamu ini?". mereka menjawab: "Adalah Kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)". Para Malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?". orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah) "(Al-Qur'an 4: 97-98)

Hal ini juga berdasarkan sebuah hadits dari Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam (Abu Dawud):

من جامع المشركين و سكن معهم فإنه مثلهم

Barang siapa berkumpul dengan kaum musyrikin dan tinggal bersama mereka maka ia seperti mereka "

Ba'asyir berpendapat bahwa negara Islam merupakan satu-satunya tatanan undang-undang serta tatanan hidup yang terus bertahan dalam berbagai zaman. Dengan hakikat kebenaran murni yang terkandung di dalam Islam, berbagai propaganda politik yang dimainkan Barat tidak akan mampu untuk melenyapkan nilai-nilai positif Islam tersebut (Awwas, 2003: 64), Ba'asyir melandasi pemikirannya dengan Al Qur'an surat At Taubah (9: 32):

"Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayaNya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai"

Negara Islam bagi Ba'asyir tidak harus diikuti dengan penyebutan Islam pada nama negara. Suatu negara Islam menjadi suatu sia-sia jika di dalam hukum positifnya syariat Islam dijalankan secara setengah-setengah atau tidak diterapkan sama sekali, Oleh karena itu, inti dari

negara dapat disebut sebagai negara Islam adalah negara yang di dalamnya menggunakan hukum positif syariat Islam bukan hukum yang lain, bukan juga dengan pemimpin yang beragama Islam atau rakyat yang bermayoritas Islam. Pandangan Ba'asyir banyak sesuai dengan pemahaman kelompok Teokrasi seperti Abul ala al Maududi, Bahkan Basyir mengatakan bahwa pemimpin hari ini (SBY waktu itu) tidak perlu diganti sampai masih sanggup jika dia setuju negara diatur dengan Islam (Oase Tauhid, 2012: 15-17)

Negara Islam adalah negara yang menjalankan landasan hukumnya berdasarkan Syariat Islam yang berpedoman kepada Al Qur'an dan Sunnah, Syariat Islam itu di wajib diamalkan secara kaafah/ keseluruhan dan syariat Islam itu bersih tidak boleh tercampur dengan pemahaman-pemahaman yang lain seperti: demokrasi, sekulerisme, dan nasionalisme (Ba'asyir, 2006)

Adapun terkait hak-hak warga negara yang bukan Muslim di Negara Islam yang sekarang di khawatirkan karena Indonesia memiliki tingkat pluralitas, Ba'asyir tidak menapikan hak tersebut, Namun Ba'asyir bahwa kemajemukan budaya dan agama saat ini tidak menjadi hambatan tersendiri dalam meloloskan ide pembentukan negara Islam

Menurut Ba'asyir bahwa kita harus berbuat baik terhadap warga negara yang bukan muslim, adil dalam urusan dunia dan tidak mengganggu harta, kehormatan dan darah orang-orang kafir yang tidak memerangi Islam. Tetapi dalam urusan kepercayaan dan ritual, orang beriman tetap wajib berlepas diri (Ba'asyir, 2006: 88), Hal ini digambarkan oleh Allah SWT dalam firmanNya (Al Qur'an 60: 8):

“ Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil “

Lebih lanjut Ba'asyir mengatakan, dalam hadits Qudsi Rasulullah SAW menyampaikan:

“ Wahai hamba-hambaku sesungguhnya aku haramkan kedzaliman atas diriku dan aku jadikan ia haram di antara kalian maka janganlah kalian saling mendzalimi (HR. Muslim). Kemudian Rasulullah bersabda lagi: “ Barangsiapa menyakiti orang kafir *Dzimmi*² maka aku musuhnya di hari kiamat nanti “ (HR.Muslim), (Ba'asyir, 2006: 89)

Adapun terkait dengan pemerintahan Islam, setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau membentuk pemerintahan Islam yang berasaskan Al Qur'an dan Sunnah. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kedudukan pemerintahan dalam Islam. Pemerintahan Islam yang mengatur segala urusan dalam pemerintahan, urusan kehidupan pribadi dan masyarakat menjadi kebutuhan yang *mustahak* (vital) dan musti diwujudkan mengingat fungsinya yang sangat penting. Abu Bakar Ba'asyir menerangkan tentang konsep pentingnya fungsi pemerintahan Islam dalam buku yang di tulis Irfan S.Awwas tentang Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba'asyir (Awwas, 2003:266-279). Diantara fungsi pemerintahan Islam adalah:

1. Menjamin berlakunya syariat Islam secara Kaffah

Tanpa adanya pemerintahan Islam syariat Islam tidak mungkin dapat diamalkan secara kaafah. Yang dapat diamalkan hanya syariat yang sifatnya kewajiban perorangan seperti sholat, shaum, dll. Demikian pula berpoligami, diadakan peraturan yang bertentangan dengan Al Qur'an dan As-Sunnah sementara perzinahan dibuka secara legal dan formal. Maka sangatlah jelas bahwa tanpa adanya pemerintahan Islam pengamalan Islam secara kaffah yang diperintahkan oleh Allah dalam Al baqarah 208 tidak mungkin dapat diamalkan.

2. Menjamin berlakunya syariat Islam secara murni

² Kafir *Dzimmi* adalah orang kafir yang tunduk dibawah kekuasaan Islam dan mereka mendapat perlindungan serta perlakuan adil, tetapi orang-orang beriman wajib memutuskan hubungan dan memusuhi orang-orang kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin

Tanpa adanya pemerintahan Islam pengamalan hukum Islam banyak tercampur adukkan dengan kepercayaan-kepercayaan sesat, adat istiadat yang bertentangan dengan Islam. Tauhid selalu dikotori dan dipermainkan dengan berbagai propaganda kemusyrikan yang berupa ajaran-ajaran tarikat dan tasawuf yang bertentangan dengan sunnah. Ajaran nasionalisme (kebangsaan), paham demokrasi yang sangat bertentangan dengan paham musyawarah dalam Islam, Pancasila sebagai asas tunggal pemerintahan dan sebagai pandangan hidup bernegara dan berbangsa, sosialisme sebagai pandangan hidup. Semuanya itu merupakan penghambat. Sebagai contoh misalnya, dalam perkawinan banyak umat Islam yang mengamalkan cara perkawinan mengikuti orang kafir, yaitu bersanding dengan wanitanya yang dihiasi dengan hiasan yang terbuka auratnya, lalu dipertontonkan di hadapan orang banyak laki-laki dan perempuan bercampur aduk. Ini jelas melanggar larangan Allah dalam Qur'an surat An Nur ayat 31 dan Al Ahzab ayat 33 Praktek perkawinan semacam ini digalakkan, setidak-tidaknya dibiarkan berlaku di negara-negara bukan dengan pemerintahan Islam. Sedang dalam pemerintahan Islam perkawinan seperti ini dilarang. Dalam bidang perdagangan dan perniagaan terjadi perbuatan riba dalam berbagai bentuk, bahkan perbuatan riba dikembangkan oleh negara karena menguntungkan perekonomian negara.

3. Menghukum orang Islam yang murtad

Pemerintahan Islam menjaga kaum muslimin agar tidak mudah dipengaruhi musuh-musuh Islam untuk keluar dari Islam (murtad) dengan janji-janji materi, sehingga orang Islam yang lemah iman dan berpandangan materialistis mudah saja menjadi murtad tanpa ada sangsi dan hukuman yang tegas. Sebab negara-negara itu membebaskan warganya untuk berpindah agama semaunya, sehingga benar-benar kepercayaan dan syariat agama untuk permainan. Di dalam Islam ada peraturan yang jelas dan tegas dimana orang tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam baik secara halus maupun dalam tekanan (Al Baqarah ayat 256), Tetapi harus diberikan pengertian sehingga ia paham dan yakin benar bahwa hanya Islam sajalah yang benar yang lain semuanya bathil. Rasulullah bersabda:

“ Barang siapa mengganti diennya (keluar dari Islam) maka bunuhlah dia (HR. Bukhari, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad dan Tirmidzi).

Perintah Rasulullah ini merupakan undang-undang yang tidak mungkin diamalkan oleh perorangan atau kelompok. Hal ini hanya dapat diamalkan melalui kekuasaan pemerintahan.

4. Menjaga tegak dan lancarnya pengamalan ubudiyah

Dalam pemerintahan Islam, tegak dan lancarnya pelaksanaan ubudiyah terutama bagi warganya (kaum muslimin). Merupakan kewajiban pemerintah yang kelak akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah. Oleh karena itu menjaga kaum muslimin agar benar-benar mereka menegakkan dan mengamalkan ubudiyah seperti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya merupakan program pemerintah. Setiap umat Islam yang meninggalkan kewajiban ubudiyah tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat akan mendapatkan hukuman, sehingga tidak akan ada seorangpun yang memudah-mudahkan untuk meninggalkan kewajiban ubudiyah

5. Memberantas kemungkaran secara terang-terangan

Di dalam negara -negara umat Islam yang sekuler, kemungkaran dibiarkan merajalela di mana-mana. Wanita-wanita dibiarkan membuka auratnya, gambar-gambar porno tersebar di majalah-majalah, televisi, music dan nyanyian-nyanyian yang membangkitkan syahwat birahi mendengung di televisi, radio, tape yang diputar di kendaraan-kendaraan umum, tempat-tempat judi dibuka secara resmi, tempat-tempat zina disediakan secara legal dan terbuka. Pemerintah tidak peduli asalkan bermamfaat secara financial mendatangkan keuntungan materi dan tidak mengganggu stabilitas kekuasaan. Akibatnya, umat Islam menghadapi bahaya keruntuhan moral dan Iman. Karena itu di dalam pemerintahan yang berlaku syariat

Islam tidak terlihat adanya kemungkaran-kemungkaran di tengah-tengah masyarakat bahkan yang Nampak adalah perbuatan yang ma'ruf, baik yang mubah atau yang sunnah maupun yang wajib. Setiap orang yang beriman jika melihat kemungkaran wajib mencegahnya dengan apa yang dia mampu (Sariyah Dawlam JAT, 1432: 35), Rasulullah Bersabda:

“Barangsiapa diantara kalian melihat kemungkaran hendaknya ia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, jika ia tidak mampu maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah iman yang paling lemah“. (Hadits Riwayat Muslim)

6. Menjaga keselamatan jiwa dan mewujudkan keamanan dan ketrentaman umum
Dalam negara umat Islam yang berhaluan sekuler, keselamatan jiwa tidak terjaga dengan baik, peristiwa kriminal, pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan antar warga masyarakat sering terjadi, tidak pernah ada keamanan yang benar-benar menetralkan. Sebaliknya ketika negara menjalankan pemerintahan Islam keselamatan jiwa, keamanan dan ketentraman menjadi perhatian utama, peristiwa kriminal dapat diminimalkan ketinggian yang serendah-rendahnya. Hal ini karena hukum Allah diamalkan sehingga janji dan jaminan Allah menjadi kenyataan. Allah Berfirman (Al Qur'an 2: 179:

Dan dalam qishas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal supaya kamu bertaqwa “ 7

Maksudnya jika hukum Islam salah satunya Qisas yang menghukum yang membunuh dengan dibunuh kembali, maka kedepannya akan banyak kehidupan karena orang akan berhati-hati untuk membunuh karena ancamannya akan dibunuh juga. Tetapi jika orang yang membunuh hanya diancam hukuman penjara maka hal itu tidak akan menimbulkan efek jera dan kasus pembunuhan akan terulang terus

7. Menjaga harta
Dalam pemahaman Islam bahwa harta ummat (masyarakat) bisa dijaga dari dua arah:
 - a. Dijaga keamanannya: Di Negara – negara sekuler harta ummat (masyarakat) tidak terjaga dengan baik. Pencuri, perampok, perampasan harta, penipuan bahkan koruptor merupakan hal yang lumrah dan tidak pernah bisa diberantas sehingga keamanan harta tidak pernah terjamin. Pemerintahan Islam dengan mengadopsi dan mengamalkan firman Allah berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut untuk terlindunginya harta ummat (masyarakat)

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Al Qur'an 5: 38)

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,” (Al Qur'an 5: 33)

Dalam Pemerintahan Islam hukum berlaku adil kepada warga negaranya, terhadap pelaku pencurian harta ummat maka hukumannya adalah potong tangan, sehingga hal ini akan mencegah orang-orang untuk mengambil harta-harta yang dimiliki oleh ummat (masyarakat)

- b. Dijaga kesuciannya

Dalam menjaga kesucian harta ummat pemerintahan Islam melaksanakan dua hal: *pertama*, mengawasi penunaian zakat semua umat Islam yang terkena kewajiban zakat, pelaksanaannya diawasi oleh pemerintah sehingga tidak seorang pun yang dapat mengelakkan kewajiban tersebut. Mereka yang enggan mengeluarkan zakat padahal mereka sudah wajib menunaikannya maka pemerintah wajib mengontrolnya. Bila tetap menolak, pemerintah boleh menjatuhkan sanksi hukuman.

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (Al Qur'an 22: 41)

Langkah *Kedua*, melarang dan membersihkan amalan riba dikalangan pemerintahan dan masyarakat

8. Menjaga kehormatan

Kehormatan laki-laki dan perempuan harus dijaga benar. Wanita dan laki-laki yang bukan muhrim dilarang bergaul bebas. Wanita apabila keluar rumah wajib menutup aurannya. Peraturan itu semua dimaksudkan untuk menjaga kehormatan wanita, (baca al-Qur'an An Nur 30-31 dan Al Ahzab 33-34). Perbuatan zina diancam hukuman berat yang belum kawin dicambuk 100 kali dan yang sudah kawin dirajam sampai mati (Al-Qur'an 24: 2)

9. Menghidupkan ilmu dan pendidikan yang berasaskan tauhid

Kewajiban pemerintahan Islam memberikan ilmu ke warga negaranya, baik ilmu syar'I maupun ilmu kauniah (ilmu pengetahuan, ilmu urusan dunia). Semua ilmu itu dipelajari tujuan pokoknya untuk menebalkan iman dan menguatkan tauhid serta menjaga diri dan masyarakat agar terselamatkan dari siksa api neraka

Pemerintahan Islam meletakkan peranan ilmu pengetahuan pada tempatnya, yaitu:

- a. Untuk lebih mengenal kekuasaan Allah dan kebenaran Al Qur'an
- b. Untuk menutup keperluan hidup dan semua perkembangannya, Memposisikan peranan ilmu pengetahuan semacam ini akan menghasilkan cendekiawan dan ilmuwan yang jika makin tinggi ilmunya makin tunduk kepada Allah dan makin yakin akan kebenaran Al Qur'an

Perjuangan untuk mendirikan negara Islam dan yang mengatur pemerintahannya dengan syariat Islam yang bersumber kepada Al Qur'an inilah yang sedang didakwahkan dan diperjuangkan Abu Bakar Ba'asyir di Indonesia. Sehingga beberapa prinsip pemerintahan Islam yaitu adil, hak-hak manusia ditegakkan, ketaatan dan ketundukan kepada sitem Ilahiyah, solidaritas sosial bisa terlaksana dalam sebuah komunitas masyarakat (ummat) yang fluralis dan heterogen dalam sebuah negara. Sikap inilah kemudian yang mendorong Ba'asyir untuk memberikan nasihat berupa buku tadzkiroh kepada para penguasa, baik aparat sipil dari presiden hingga camat yang dibagikan oleh anggota JAT di 5 wilayah tempat perwakilan JAT berada, maupun kepada aparatur bidang hukum dan pemerintahan: DPR dan MPR, Kepolisian dan TNI³. Pandangan konsep negara dan pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh tokoh politik Muhammad Natsir hanya perbedaan dalam mewujudkannya, Muhammad Natsir melalui sistem perjuangan melalui parlemen sedangkan Abu Bakar Ba'asyir non parlemen

³ Baca buku Tadzkiroh 1, 2 dan 3 yang dikeluarkan dan dicetak missal oleh JAT Media Center yang merupakan sayap media dari JAT

Pandangan Tentang Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah perkara penting yang dapat membawa kejayaan atau menjerumuskan orang yang dipimpinnya ke lembah kesengsaraan, baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Banyak yang menderita di dunia karena kepemimpinan yang salah dan banyak pula orang yang masuk neraka karena sewaktu hidupnya mengikuti pimpinan-pimpinan yang sesat.

Di akhirat nanti ada sekelompok orang yang sangat kecewa kepada pemimpinnya sehingga mereka mengutuk pemimpinnya dan meminta Allah mengadzabnya karena telah menyesatkan mereka ketika mereka hidup di dunia

Allah berfirman:

"Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata: "Alangkah baiknya, andaikata Kami taat kepada Allah dan taat (pula) kepada Rasul". Dan mereka berkata; "Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya Kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar Kami, lalu mereka menyesatkan Kami dari jalan (yang benar). Ya Tuhan Kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar". (Al Qur'an 33: 66-68)

"Dan mereka semuanya (di padang Mahsyar) akan berkumpul menghadap ke hadirat Allah, lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong: "Sesungguhnya Kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, Maka dapatkah kamu menghindarkan daripada Kami azab Allah (walaupun) sedikit saja? mereka menjawab: "Seandainya Allah memberi petunjuk kepada Kami, niscaya Kami dapat memberi petunjuk kepadamu. sama saja bagi kita, Apakah kita mengeluh ataukah bersabar. sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri" (Al- Qur'an 14: 21)

Ayat -ayat tersebut menerangkan betapa besarnya penyesalan dan kemarahan rakyat yang disesatkan pemimpin mereka di dunia. Waktu di dunia pemimpin tersebut mereka hormati dan cintai, karena pandai menjanjikan kekayaan dan kemewahan dunia, tetapi para pemimpin itu menyesatkan mereka dari Jalan Allah (Ba'asyir, 2006: 101-104).

Ba'asyir memandang bahwa kepemimpinan dalam Islam harus dibebaskan dari kepemimpinan Thoghut. Didalam Al Qur'an Allah menamai pemimpin -pemimpin sesat dan menyesatkan orang banyak/ pengikut-pengikutnya dengan Istilah Thoghut (yang melampaui batas), Thoghut adalah kepemimpinan orang kafir yang programnya kepemimpinannya adalah mengeluarkan rakyatnya / pengikutnya dari cahaya keimanan dan menyeret mereka kepada kegelapan jahiliyah/kekafiran. (Ba'asyir, 2006: 110-111)

"Allah pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Al Qur'an 2: 257)

Adapun perwujudan kepemimpinan Thoghut yang Nampak sehari-hari menurut Ba'asyir:

- Semua Pemimpin kafir terutama di negara kuffar
- Semua pemimpin yang zahirnya memeluk Islam dan memimpin negara – negara ummat Islam, tetapi mereka berpaham sekular (Ba'asyir, 2006: 111)

Oleh karena itu, orang-orang kafir ahli kitab (Yahudi dan Nashrani) maupun orang musyrik dan kaum sekular tidak boleh diangkat menjadi pemimpin umat Islam, Larangan ini diterangkan Allah SWT dalam firmanNya:

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).” (Al Qur’an 3: 28)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim” (Al Qur’an 5: 51)

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil Jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu Jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman” (Al Qur’an 5: 57)

Sehingga sangatlah jelas bahwa dalam pemikiran Abu Bakar Ba’asyir kepemimpinan itu harus berasal dari orang Islam dan Beriman bukan berasal dari orang kafir baik Yahudi, Nasrani maupun orang Musyrik, Alasan Ba’asyir tidak mau dipimpin oleh orang kafir karena disebabkan orang kafir dalam Al Qur’an digambarkan mempunyai sifat banyak berbuat kerusakan di Bumi dan mempunyai program memurtadkan orang beriman (Ba’asyir, 2006: 116-120). Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam firmannya:

“Dan kaum Fir’aun yang mempunyai pasak-pasak (tentara yang banyak), Yang berbuat sewenang- wenang dalam negeri, Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu,” (Al Qur’an 89: 10-12)

“ Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang (kepada kekafiran), lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi.” (Al Qur’an 3: 149)

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar)". dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.” (Al Qur’an 2: 120)

Ayat – ayat inilah yang menjadi pijakan Ba’asyir untuk tetap mengkampanyekan memilih orang yang beriman. Lebih lanjut Ba’asyir mengemukakan kepemimpinan itu tidak boleh diberikan kepada orang kafir, dan apabila kepemimpinan muslim terjerumus dalam kekafiran yang nyata maka kepemimpinannya batal, gugur kewajiban taat kepadanya dan wajib bagi kaum muslimin untuk bangkit mencopotnya dan mengangkat seorang Imam yang adil jika mereka mampu melakukannya. Adapun jika pemimpin muslim itu terjerumus dalam kemaksiatan maka harus menggantinya jika tidak menimbulkan fitnah, namun jika menimbulkan fitnah maka harus sabar. (Sariyah Dawlam, 1432: 38-39)

Berdasarkan hadits Rasulullah:

“Dari ubadah bin Shamit berkata: “ kami telah membaiah Rasulullah Shallallahu alayhi wa sallam untuk mendengar dan tha’at, baik pada waktu sulit ataupun mudah, senang maupun berat, walaupun hal ini itu tidak kami senangi, dan agar kami tidak memperlakukan kepemimpinan dari pemegangnya kecuali jika ia kuffur bawwah (nyata) dan kamu sekalian memiliki bukti (kejelasan) dari Allah “21

Dalam hadits lain Muttafaqun 'Alaihi:

“Barang siapa yang melihat amirnya berbuat sesuatu yang tidak ia sukai, maka hendaklah ia bersabar karena sesungguhnya jika ia memisahkan diri dari jamaah walaupun sejenkal kemudian mati, maka ia mati seperti matianya orang jahiliyah “

Ba'asyir juga berpandangan wanita haram diangkat menjadi Pemimpin kaum Muslimin. Allah SWT menetapkan bahwa laki-laki adalah pemimpin wanita. Sebagaimana firman Allah:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (Al Qur'an 4: 34)

Disamping itu, Rasulullah SAW bersabda:

“....Ketika sampai kepada Rasulullah bahwa penduduk negeri Parsi telah mengangkat Putri Kisro menjadi raja mereka, Beliau SAW bersabda: tidak akan beruntung suatu kaum yang menjadikan seorang perempuan memimpin urusan mereka “ (HR Bukhari.)

Ayat diatas sebenarnya menerangkan konsep kepemimpinan rumah tangga, yakni setiap rumah tangga muslim kepemimpinannya adalah lelaki (suami). Kalau dalam persoalan rumah tangga saja harus dipimpin oleh seorang lelaki maka sangat logis kalau urusan masyarakat yang lebih luas / pemerintahan juga harus dipimpin lelaki. Itu sebabnya Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan dalam hadits tersebut apabila suatu kaum mengangkat wanita untuk memimpin mereka, maka mereka tidak akan beruntung (Ba'asyir, 2006: 122)

Ba'asyir juga memandang bahwa kepemimpinan Islam juga harus dalam bentuk Khilafah. Wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk hidup dibawah satu kepemimpinan Khalifah, yang mengatur seluruh urusan mereka berdasarkan syariat Islam untuk kemaslahatan dunia dan akhirat (Sariyah Dwalam, 1432: 32)

Pandangan Tentang Demokrasi

Kata demokrasi tidak dijelaskan dalam syariat dan tidak dikenal dalam bahasa Arab. Dengan demikian untuk mengetahui arti dan hakikatnya harus dikembalikan kepada pemilik bahasa dan para pencetusnya. Berkaitan dengan masalah ini dalam kitab *Ahkamul Mufti* Ibnuul Qayyim mengatakan bahwa seorang *mufti* tidak boleh berfatwa mengenai masalah pengakuan, sumpah, wasiat, dan yang lainnya, jika fatwanya berhubungan dengan kata-kata itu. Oleh karena itu, meskipun mungkin saja arti kata yang digunakan si orang itu bertentangan dengan hakikat arti kata dalam bahasa asalnya. Kala *mufti* tidak berusaha memahami arti suatu kata sesuai dengan kebiasaan orang yang memakai kata itu, maka ia akan sesat dan menyesatkan (A'lamul Muwaqii'in IV/228)

Demokrasi dalam pandangan Ba'asyir adalah kedaulatan rakyat. Dan kedaulatan itu inti dasarnya adalah hak mutlak dalam membuat undang undang yang tidak tunduk kepada kekuasaan apapun selain padanya (Ba'asyir, 2006: 33). Dalam demokrasi yang menjadi patokan hukum adalah kedaulatan di tangan rakyat. Seperti yang telah dibahas di bagian depan, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang tidak mengenal kekuasaan yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, kekuasaan itu berasal dari rakyat tanpa ada batasan apapun. Rakyat berhak berbuat apa saja dan membuat undang-undang semaunya. Padahal hak membuat hukum sesungguhnya merupakan sifat Allah, (Ba'asyir, 2006: 38),Sebagaimana diutarakan-Nya di bawah ini:

“..... Dan Allah menetapkan hukum (menurut kehendak-Nya), tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya; dan Dia-lah yang Maha cepat hisab-Nya” (Al Qur'an Surat 13: 41)

“ Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Al Qur’an Surat 5: 1)

Ba’asyir mengutip perkataan Abdul Qadir bi Abdul Aziz bahwa demokrasi menjadikan manusia sekutu bagi Allah dalam membuat undang-undang, Perbuatan ini adalah kufur akbar yang tidak ada keragu-raguan lagi padanya. Rabb (Tuhan) baru dalam demokrasi adalah kemauan manusia (Ba’asyir, 2006: 39)

Bahkan Ba’asyir menganggap demokrasi adalah agama baru sebagaimana ucapannya: bahwa demokrasi adalah agama yang berdiri sendiri dengan pemegang kedaulatan adalah rakyat. Jelas ajaran ini bertentangan dengan Dinul Islam yang menegaskan bahwa pemegang kedaulatan adalah Allah SWT, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “ Penguasa itu adalah Allah Tabaroka Wata’ala “ (Ba’asyir, 2006: 40-41)⁴

Keyakinan Ba’asyir didorong juga dengan Fikih Realita dimana di Indonesia negara tempat Abu Bakar Ba’asyir hidup dan tinggal banyak sekali peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al Qur’an dan Sunnah. Misal hukum menggunakan Jilbab di Kepolisian yang sempat menjadi perdebatan. Padahal Al Qur’an sudah mewajibkan buat seorang perempuan Islam yang sudah Aqil Baligh untuk menggunakan Jilbab yang menutupi auratnya.

Sikap tegas Ba’asyir terkait dengan demokrasi ini mendapat legalitas dari Ulama pemikir politik Islam yang menjadi salah satu rujukan, Ba’asyir menguti perkataan Abul A’la Al Maududi:

“ Sehubungan dengan penuhanan manusia didalam demokrasi, Ustadz Abul A’la Al Maududi menyatakan: Dasar-dasar kebudayaan Barat sesungguhnya kebudayaan modern yang menjadi landasan peraturan hidup pada masa sekarang ini, dengan berbagai macam cabang-cabangnya baik aqidah, akhlak, perekonomian, politik dan intelektual berfokus pada tiga pokok yaitu prinsip-prinsip pokok berikut: 1) Sekularisme 2) Nasionalisme 3) Demokrasi. Prinsip pokok ketiga yakni demokrasi adalah penuhanan terhadap manusia, Dengan diagungkannya demokrasi dengan dua prinsip pokok sebelumnya, maka sempurnalah gambar bencana dan kelelahan-kelelahan dunia Telah kukatakan tadi bahwa pengertian demokrasi dalam kebudayaan modern adalah berkuasanya rakyat, artinya setiap penduduk negara merdeka berkuasa terhadap segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan sosial mereka dan perundang-undangan negara tersebut haruslah mengikuti keinginan mereka (Ba’asyir, 2006: 41-42)

Kritik atas sistem demokrasi ini disampaikan dengan tegas melalui pernyataan:

“ Saya sudah mengkritik tegaskan bahwa demokrasi ini syirik, dan orang yang mempercayai demokrasi, mengamalkan karena percaya setelah dia diberi tahu dan tidak bisa mendapati dalil syar’I, itu murtad. Ini jelas syirik, dimana kedaulatan tertinggi di dalam menentukan undang-undang itu diberikan kepada manusia. Padahal itu haknya Allah. Allah itu disebut Rabb itu mempunyai dua pengertian, pemilik dan pengatur maka Allah itu Rabbul alamin “ (Adidhatama, 2009: 92)

Demokrasi di Indonesia menurut Ba’asyir juga berkiblat dari pihak barat, dimana semua sistem yang dipakai di Indonesia merupakan adopsi dari Barat. Di Sistem demokrasi ini dalam hal pengambilan keputusan selalu berada pada rakyat dalam arti meminta persetujuan dari rakyat melalui parlemen. Hal inilah yang disebut sebagai kedaulatan rakyat. Kedaulatan yang ada diatas segalanya. Cara tersebut sangat tiak dibenarkan di dalam Islam, kedaulatan tersebut bisa dikatakan sebagai kedaulatan yang menyekutukan kadaulatan Allah. Di dalam kedaulatan Islam yang menggunakan syariat, segala keputusan ada di tangan amir atau pemimpin melalui musyawarah dari majelis syuro atau dewan ahli serta berpedoman kembali kepada Al Qur’an dan

⁴ Hadits ini diriwayatkan Abu Dawud pada bab *Kitabul Adab* dalam kitab sunan Abu Dawud dengan sanad Shahih

Sunnah, Selama masih ada dalam koridor dua sumber hukum tersebut, keputusan amir harus diikuti serta dijalankan, Pemimpin selalu dijadikan sebagai peran akhir dari pengambilan keputusan. Inilah bagaimana suatu keputusan diambil di dalam syariat Islam,

Pandangan tentang keharaman demokrasi menurut Abu Bakar Ba'asyir berbeda dengan tokoh yang memperjuangkan formalisasi syariat Islam dalam lembaga negara. Natsir adalah salah satunya yang memanfaatkan demokrasi sebagai sarana dan *wasilah* perjuangan memperjuangkan syariat Islam. Natsir masuk kedalam sistem parlemen yang ada di Indonesia dengan sistem demokrasi yang berjalan saat itu.

Pandangan Tentang Sekulerisme dan Nasionalisme

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa prinsip sekulerisme, nasionalisme, dan demokrasi merupakan pokok-pokok bukan ajaran Islam. Sekulerisme hari ini telah melepaskan manusia dari peribadatan, ketaatan dan ketakutan kepada Allah, Sekulerisme juga melepaskan kita dari ikatan – ikatan akhlak yang telah ditetapkan dan melepaskan tali belenggunya serta menjadikan manusia menjadi hamba diri mereka sendiri, tanpa pertanggung jawaban dihadapan siapapun.

Pemahaman sekuler mencoba memisahkan antara agama dari negara, Hal ini tidak dibenarkan didalam agama dan terbukti dengan penerapan sistem sekuler ini posisi agama semakin terpinggirkan bukan hanya terlepas dari sistem kenegaraan saja, namun menjaral ke ruang publik.

Masih ada pelarangan di negara-negara penganut atas hak-hak seperti hak wanita menggunakan jilbab yang tidak boleh masuk ke dalam pendidikan dan perkantoran karena dianggap sebagai simbol agama. Negara sekuler pun tidak boleh memisahkan hak beragama seorang di ruang publik, mencampurkan urusan keagamaan terhadap peraturan keagamaan yang sifatnya umum, hak beragama harus dijadikan jaminan dan merupakan kebebasan individu, jadi masih ada kepentingan politis di kasus tersebut. Bisa saja ada ketakutan negara atas eksistensi agama yang mulai tumbuh di negara yang bersistem sekuler tersebut.

Ba'asyir mengomentari terkait jatuhnya pemerintahan Islam terakhir di Turki tahun 1924 yang mengganti sistem pemerintahan Islam dengan sistem pemerintahan sekuler:

“ Sejak Kekhilafahan dihapus oleh musuh Allah Attarurk, itu buka negara Islam lagi. Jadi negara Turki dibawah Kamal Attarurk itu sudah negara kafir karena sudah tidak memakai lagi hukum Islam, tidak didasarkan oleh Islam dan sudah memakai sistem sekuler meskipun penduduknya bermayoritas Islam. Jadi negara Islam itu cirinya Amirnya Muslim, dasarnya Qur'an dan Sunnah dan hukum positifnya syariat Islam. Lalu disempurnakan dengan undang-undang buatan manusia tetapi sandarannya didalam membuat undang-undang itu syariat Islam. Maka seperti negara Turki jelas negara sekuler sama dengan negara kafir sampai sekarang “ (Adhidhatama,2009: 91)

Adapun nasionalisme dalam pandangan Ba'asyir khususnya nasionalisme yang di Indonesia:

“ Nasionalisme yang ada di Indonesia juga sama dengan demokrasi dan sekuler artinya sama dengan sistem kafir, Alasan diambilnya sistem nasionalisme ini dikarenakan masyarakat

Indonesia yang terdiri dari suku, etnis maupun ras serta adat istiadat didalamnya., namun hal ini tidak dapat dijadikan suatu alasan syariat Islam tidak bisa masuk dalam sistem kenegaraan Indonesia. Syariat Islam dapat dicocokkan dengan adat istiadat bangsa Indonesia dengan melihat terlebih dahulu nilai-nilai adat yang cocok dengan Islam dapat dipertahankan dan yang tidak cocok dengan syariat harus dibuang karena prinsipnya adat istiadat ini dibuat oleh tangan manusia maka suatu kekurangan itu pasti ada, oleh sebab itu pentingnya untuk diserasikan oleh hukum syariat juga”.

Ba'asyir melihat bahwa ide nasionalisme ini justru akan menyempitkan umat Islam secara global yang hanya dilandasi dengan wilayah, berbeda pada negara negara Islam dengan Khilafahnya

dimana umat Islam tidak terpisahkan oleh wilayah melainkan hanya dibatasi dari sifat keagamaan manusia (Adidhatama, 2009: 93-94)

GERAKAN POLITIK

Dakwah: Media Menyampaikan Isu Politik

Dakwah adalah kewajiban untuk umat Islam. Setiap pribadi mempunyai kewajiban dakwah dengan kemampuannya masing-masing. Baik di atas mimbar, di perkantoran, di kehidupan bermasyarakat bahkan ketika kita menggunakan fasilitas teknologi pun seperti internet dan sosial media melekat kewajiban dakwah di dalamnya, sebagaimana firman Allah:

“ Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (al Qur’an 16: 125)

Media dan langkah yang pertama Ba’asyir lakukan untuk mewujudkan Ide Politiknya tersebut adalah dengan melakukan Dakwah. Dakwah yang menjadi kewajiban setiap muslim tersebut menjadi bernilai tambah karena dengan berdakwah tersebut masyarakat akan mulai mengenal tentang konsep negara, pemerintahan dan kepemimpinan Islam. Mendakwahkan dan menegakkan Dinul Islam diwajibkan atas umat Islam (Ba’asyir, 2006: 213) Dengan peranan dakwah inilah kemudian sebagian masyarakat menyadari tentang pentingnya syariat Islam, Abu Bakar Ba’asyir sebagai dai sangat rajin dan bersemangat dalam berdakwah untuk merubah dan menyadarkan masyarakat dan umat Islam, sedikitnya 10 tempat tiap bulannya di setiap tempat berbagai daerah di Indonesia yang meminta jadwal untuk mendapatkan materi dakwah dari Ba’asyir⁵. Bahkan saking semangatnya Ba’asyir berdakwah sampai sedikit jadwal tidurnya untuk memberikan dakwah ke masyarakat⁶. Dakwah dan amar ma’ruf nahi munkar adalah kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh perorangan maupun oleh sebuah komunitas muslim untuk menjaga keberlangsungan syariat Islam (Sariyah dawlam, 1432: 30)

Ba’asyir terus mendakwahkan tentang konsep Dinul Islam, Syariat Islam, Negara Islam. Dalam tatanan politik hari ini seorang menyampaikan misi dan visi dengan menyampaikan di kampanye dan mimbar – mimbar politik, Maka Abu Bakar Ba’asyir menyampaikannya dengan dakwah di mimbar – mimbar dakwah, kampanye politik Ba’asyir menyampaikan tentang pentingnya syariat Islam, negara, pemerintahan dan kepemimpinan Islam di tempat dakwah dengan tabligh akbar dan ceramah pengajian.

Jamaah Sebagai Basis Massa

Kehidupan jamaah adalah kehidupan yang dicontohkan oleh Rasulullah, jamaah merupakan miniatur kehidupan dalam ajaran Islam sebelum melangkah ke kehidupan jamaah yang lebih besar lagi yaitu daulah dan khilafah. Kehidupan jamaah tidak lepas dari kehidupan amir (pemimpin) dan yang dipimpinnya yang diikat dengan aturan-aturan yang tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan syar’I yang terdapat dalam Al Qur’an dan Sunnah. Terdapat banyak dalil yang memerintahkan untuk menjalankan kehidupan jamaah. Diantaranya:

“ Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa

⁵ Data ini penulis dapatkan dari Firman taufiquroman Katib Aam JAT dalam sebuah obrolan santai di kantor JAT wilayah Jakarta tahun 2012

⁶ Pernah penulis meminta ijin untuk menginap di kantor JAT wilayah Jakarta, penulis satu hari mendapatkan Abu Bakar Ba’asyir pulang berdakwah jam 11 malam, namun jam 2 dini hari penulis di bangunkan oleh Abu Bakar Ba’asyir untuk melaksanakan sholat malam

Jahiliyah) bermusuhan-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk” (Al Qur'an 3: 103)

Dalam hadits Rasulullah bersabda:

“dan saya perintahkan kamu sekalian untuk mengamalkan lima perkara yang Allah telah memerintahkan kepada saya untuk mengamalkannya, yaitu berjamaah, mendengar, menaati, berhijrah dan berjihad “

Umar bin Khattab berkata:

“ Tidak sempurna Islam kecuali dengan berjamaah dan tidak ada jamaah kecuali pimpinan dan tidak ada pimpinan kecuali dengan ketaatan “

Ba'asyir menilai bahwa pentingnya fungsi pemerintahan untuk mengamalkan Dinul Islam secara bersih dan sempurna, maka Allah SWT dan Rasul-Nya memerintahkan agar umat Islam hidup hidup bersatu di bawah satu pimpinan dan berpegang teguh dengan tali Allah SWT (Ba'asyir, 2006: 197-198), Pengamalan Dinul Islam secara ideal harus dengan sistem berjamaah bukan sendiri-sendiri atau kelompok –kelompok apalagi bercerai berai. (Ba'asyir, 2006: 199), Kami menjauhi perpecahan dan perselisihan, dan kami mengajar kepada kesatuan kata dan persatuan di bawah bendera tauhid (sariyah dawlam, 1432: 34)

Yang dimaksud Jamaah oleh Ba'asyir adalah berdaulah Islamiyah, yakni khilafah yang membawahi berbagai bangsa yang disatukan dengan kalimat tauhid, Persatuan ini bukan didasarkan atas kebangsaan, bahasa atau warna kulit. Kekuasaan khilafah itu dasarnya Al Qur'an dan sunnah dan hukum positifnya adalah syariat Islam secara kaffah seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW di Madinah sampai baginda SAW wafat. Contoh Rasulullah ini selanjutnya diamalkan oleh para sahabatnya dan ummat Islam setelahnya (Ba'asyir, 2006: 200)

Ba'asyir menjelaskan setidaknya ada lima perbedaan antara sistem organisasi sekuler dan Jamaah (Sariyah Dawlam, 1432: 31-32):

1. Sistem sekuler bersumber dari sistem di luar Islam (kuffar) sedangkan sistem jama'ah bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah
2. Pergantian kepemimpinan menurut sistem sekuler adalah periodic, sedangkan dalam sistem Islam sesuai dengan pembahasan tentang pengangkatan amir.
3. Dalam sistem sekuler, seorang pemimpin terikat dengan hasil rapat. Sedangkan dalam Islam, Amir memiliki hak pilih dalam musyawarah
4. Kepemimpinan dalam sistem sekuler adalah kepemimpinan kolektif, sedangkan dalam Islam kepemimpinan mutlak di tangan Amir, dan seluruh anggota berkewajiban mentaati
5. Sistem seekuler berpotensi terjadinya kekacauan dan kerusakan karena Amir tidak mempunyai otoritas kontrol penuh, sedangkan sistem imamah dengan otoritas control penuhnya akan membawa rahmat, kebersatuan, kebaikan dan ketentraman

Adapun keberadaan Jamaah Ansharut Tauhid sebagai lembaga yang belum berbentuk daulah dan khilafah menurutnya tidak menjadi masalah selama: 1) Tidak menamakan diri / jamaah dengan nama yang mengandung makna penguasaan kaum muslimin 2) Sang pemimpin tidak menyebut dirinya sebagai khalifah 3) Tidak membangun batas baro'ah⁷ kepada sesama muslim yang belum bergabung jamaahnya 4) memahami dan memahamkan kepada anggotanya bahwa perbedaan jamaah ini hanyalah sebatas perbedaan kendaraan dalam beramal jama'i., hingga tidak perlu memperbesar perbedaan pandangan dengan jamaah lain 5) harus berusaha

⁷ Baro'ah asal katanya bara' yang maknanya permusuhan, dalam hal ini sebuah jamaah minal muslimin tidak boleh menjatuhkan permusuhan kepada sesama muslim disebabkan berbeda dalam jamaah.

untuk berhubungan dengan jamaah lain yang se-visi untuk saling berdialog demi usaha untuk bersatu menjadi satu jamaah, Karena dengan cara demikian jamaah muslimin akan terbentuk 6) tidak menamakan diri dengan daulah/negara jika belum menguasai suatu daerah secara nyata 7) Hendaknya melihat perbedaaan jamaah sebagai ladang bekerja sama bukan ajang persaingan dan permusuhan (sariyah dawlam, 1432: 33-34)

Jamaah atau basis masa merupakan hal yang penting dalam politik. Tanpa adanya basis massa yang jelas maka ide politik seperti hanya sebuah teori dan tidak adanya dukungan berarti secara konsep ide politiknya gagal, Hal ini setidaknya di sadari betul oleh Ba'asyir sehingga massa pengajian dan ceramah-Nya kemudian ditawarkan untuk bergabung dalam komunitas jamaah yang dipimpinnya. Jamaah yang ingin memperjuangkan syariat Islam menjadi landasan sebuah negara. Tidak ada paksaan dalam perekrutan basis massa tersebut semuanya berdasarkan suka rela dan lebih karena persamaan keinginan dan persamaan tujuan untuk menegakkan syariat Islam.

Basis Massa atau Jamaah Ba'asyir merupakan jamaah yang solid, selain disebabkan karena kesamaan ideologi, faktor yang lain yang menyebabkan jamaah ini solid adalah dengan adanya Bai'at antara pemimpin dalam hal ini Abu Bakar Ba'asyir dan pengikutnya. Bai'at yang isinya untuk tetap taat kepada pemimpin selama pemimpin itu berada di jalan Allah dan rasul-Nya, dan menolong pemimpin untuk memperjuangkan agama Allah.

Bai'at ini menyebabkan anggota JAT yang sudah berbai'at akan berusaha bersungguh – sungguh menolong Ba'asyir dalam meperjuangkan agama Allah., dengan harta dan jiwa mereka. Hal ini tidak akan didapatkan di organisasi yang tidak diikat dengan Bai'at atau mu'ahadah⁸.

Sehingga konsep jamaah atau basis massa merupakan kebutuhan pokok untuk kebutuhan politik yang dibawa Ba'asyir, adanya basis massa akan membantu Ba'asyir dalam menyampaikan ide-ide politiknya berupa dakwah para anggotanya kepada masyarakat yang tidak bisa disentuh oleh Abu Bakar Ba'asyir sendiri.

Nahi Munkar: Politik Pencitraan di Masyarakat

Munculnya penyakit masyarakat di berbagai daerah di Indonesia berupa minuman keras, perzinahan, judi dan penyakit masyarakat lainnya bukan saja menimbulkan keresahan di masyarakat namun juga berdampak tidak dipercayanya aparat hukum karena dianggap telat dalam bertindak dan berbuat berdasarkan hukum yang ada di negara Indonesia, JAT sebagai organisasi yang bergerak berdasarkan nilai Ilahiyah berusaha menjadi solusi di masyarakat, mereka berusaha menghilangkan penyakit masyarakat tersebut dengan gerak jamaah dalam nahi munkar di masyarkat. Apa yang dilakukan Jamaah JAT ini mendapatkan persetujuan dari Abu Bakar Ba'asyir karena ini merupakan bagian dari akidah dan manhaj JAT. Setiap orang yang beriman jika melihat kemungkaran wajib mencegahnya semampunya (Sariyah Dawlam, 1432: 31).

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

“Barang siapa diantara kalian melihat kemungkaran hendaknya ia mengubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, jika ia tidak mampu maka dengan lisannya, dan jika ia tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah iman yang paling lemah” (HR Muslim)

Apa yang dilakukan JAT ini membawa nilai positif untuk perjuangan dan pergerakan jamaahnya, Citra di masyarkat mulai terbina dengan adanya kerjasama dengan masyarakat dalam menangani masalah penyakit masyarakat. Bahkan kata Muhammad Achwan⁹ pergerakan

⁸ Bai'at adalah sebutan bersumpah setia kepada kholifah pemimpin kaum muslimin, sedangkan mu'ahadah adalah bersumpah setia kepada pemimpin-pemimpin jamaah minal muslimin. Bai'at JAT Terlampir

⁹ Amir Jamaah Ansharusy Syariah, yang sebelumnya adalah amir biniyabah (pelaksana) JAT ketika Abu Bakar Ba'asyir di tahan

JAT dalam menangani masalah penyakit di masyarakat ini mendapat respon pencitaan yang positif dari masyarakat, bahkan di kota Cirebon masyarakat lebih percaya dengan gerakan amanar (amar ma'ruf nahi munkar) JAT dibandingkan dengan Kepolisian¹⁰ Sebelum Ba'asyir bergabung dengan ISIS di tahun 2014 yang kemudian membuat Ba'asyir ditinggalkan sebagian besar anggotanya.

Surat Diplomasi: Politik Kenegaraan

Aktivitas dakwah Abu Bakar Ba'asyir tidak hanya kepada masyarakat dan rakyat umum tetapi juga kepada apartur negara, birokrat dan pejabat negara. Dalam aktivitas dakwah di Majelis Mujahidin (MM) dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) Ba'asyir sering mengeluarkan surat pernyataan, surat seruan yang penulis lihat ini merupakan bentuk dari diplomasi politik Ba'asyir yang berusaha menyuarakan apa yang diyakini-Nya maupun yang menjadi seharusnya menjadi solusi bangsa. Tidak sedikit juga surat diplomasi Ba'asyir ditujukan kepada kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara luar negeri,

Surat Diplomasi yang di buat Abu Bakar Ba'asyir terbagi menjadi dua periode: *Pertama* yaitu ketika Abu Bakar Ba'asyir memimpin Majelis Mujahidin (MM) antara tahun 2000 sampai tahun 2008, Surat diplomasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surat No 07/SEK/LT/XII/200 tentang penegakan Syariat Islam, Surat yang ditujukan kepada Presiden Indonesia waktu itu KH. Abdurahman Wahid agar mau mengimplementasikan berlakunya syariat Islam terkait akan dilaksanakannya syariat Islam di Aceh (Lampiran terlampir)
2. Surat No 07/AHWA/MM.II/2001 tentang mengatasi krisis bangsa yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan lembaga –lembaga tertinggi dan tinggi negara. Ba'asyir dalam suratnya ini menghimbau Presiden maupun lembaga tinggi negara untuk memperhatikan 13 point masukan yang dibuat pada lampiran surat tersebut. (Lampiran terlampir)
3. Surat maklumat tentang presiden wanita, surat maklumat ini disampaikan terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia (lampiran terlampir)
4. Seruan kepada pimpinan nasional dan elit politik Indonesia terkait tuntutan kembali kepada tuntunan Islam secara utuh (kaffah) dan penegakan syariat Islam 9 (lampiran terlampir).
5. Surat No. 89/MM/AHWA/IX/2001 tentang masukan untuk politik luar negeri Indonesia yang ditujukan kepada pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia, surat ini terkait tragedy penyerangan gedung WTC dan pentagon dan bagaimana pemerintah Indonesia harus bersikap (lampiran terlampir)
6. Surat No 90/MM/AHWA/IX/2001 terkait dengan sumbang pemikiran, Surat yang ditujukan kepada Presiden Amerika Serikat George Bush. Surat berisi tentang tragedy kemanusiaan penyerangan gedung WTC dan Pentagon, Isu Terorisme dan bagaimana Amerika harus bersikap menghadapi masalah tersebut (lampiran terlampir)
7. Surat Seruan tentang amandemen UUD 1945, surat seruan yang merupakan hasil dari sidang tahunan Majelis Mujahidin pada awal November 2001 (lampiran terlampir)
8. Surat berisi tentang pandangan Majelis Mujahidin tentang terorisme internasional (lampiran terlampir)
9. Surat No 139/MM AHWA/VII/2002 tentang Tadzkirah kepada pimpinan MPR RI, suart yang berisi desakan Majelis Mujahidin terkait amandemen UUD 1945 agar pimpinan MPR, pimpinan fraksi dan pimpinan parpol untuk mengembalikan bunyi pasal 29 ayat 1 UUD 1945 sebagaimana piagam Jakarta (lampiran terlampir)
10. Tadzkirah Majelis Mujahidin disampaikan kepada Wakil Presiden DR. Hamzah Haz baik terkait dengan permasalahan dalam negeri maupu permasalahan luar negeri (lampiran terlampir)

¹⁰ Wawancara pribadi dengan Muhammad Achwan

11. Seruan Majelis Mujahidin kepada ulama di Indonesia terkait sikap dan perjuangan di Indonesia (lampiran terlampir)
12. Surat reaksi Abu Bakar Ba'asyir atas larangan mengikuti shalat Jum'at di Masjid yang ditujukan kepada penyidik Mabes Polri yang melarang beliau untuk melaksanakan sholat Jum'at pada 20 Desember 2002, (lampiran terlampir)
13. Surat terkait dukungan hidup sederhana dan melepas ketergantungan dari negara asing, surat yang ditujukan kepada presiden RI Megawati Soekarno Putri yang berisi himbauan untuk memecahkan masalah ekonomi yang terjadi di negara Indonesia (lampiran terlampir)
14. Tadzkirah untuk Wakil Presiden RI Hamzah Haz berupa anjuran untuk hidup sederhana untuk mengatasi musibah negara dan melunasi utang luar negeri. (lampiran terlampir)
15. Surat untuk komisi I DPR RI yang isinya terkait bantahan Abu Bakar Ba'asyir atas tuduhan Kapolri terlibat Bom Bali (lampiran terlampir)
16. Surat No 175/MM AHWA/III/2003 tentang Tadzkirah untuk pemerintah Saddam Husain untuk menegakkan syariat Islam dan dukungan atas ketidakadilan yang dilakukan PBB atas pemerintahan Iraq (lampiran terlampir)
17. Surat kepada George W. Bush Presiden Amerika Serikat tentang himbauan masuk Islam (lampiran terlampir)

Adapun periode yang *kedua* adalah surat diplomasi Abu Bakar Ba'asyir yang dibuat ketika menjabat sebagai Amir Jamaah di Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), sebagai berikut:

1. Surat untuk ketua Mahkamah Agung (MA), ketua Jaksa Agung, Kapolri dan Kadensus 88 tanggal 30 November 2010 terkait pelatihan militer di Jantho Aceh, merupakan pengamalan syariat bukan tindakan terror (lampiran terlampir)
2. Surat untuk Thein Sein Presiden Myanmar tanggal 22 Juli 2002 terkait pembantaian kaum muslimin di Myanmar dan ancaman akan mengirimkan Mujahidin ke Myanmar (lampiran terlampir)
3. Surat untuk partai Ikhwanul Muslimin di Mesir dan PKS di Indonesia tanggal 11 Juli 2013 terkait seruan untuk menegakkan syariat Islam (lampiran terlampir)
4. Surat untuk Benigno Aquino Presiden Filipina 9 Desember 2013 tentang musibah yang menimpa negara Filipina dan himbauan untuk kembali ke ajaran Isa Alaihi wasallam, dan untuk umat Islam di Filipina untuk bertaubat dan umat di luar Islam untuk masuk Islam (lampiran terlampir)

Jihad fii Sabilillah: Politik Bela Islam dan Negara

Jihad dalam Islam adalah sebuah ajaran yang mulia. Bahkan ulama mengatakan bahwa jihad merupakan puncak amal dalam Islam. Jihad menuntut Ilmu, Jihad memperjuangkan agama Allah dan Jihad berperang melawan orang-orang kafir. Dalam pemahaman Ba'asyir yang sering dibahas dalam bukunya Jihad yang dimaksud adalah berperang melawan orang kafir dalam membela agama Allah. Jihad fii sabilillah adalah syariat yang amat besar perannya untuk mencapai kemenangan perjuangan menegakkan Dienul Islam dengan izin Allah dan untuk melindungi Islam dan kaum muslimin dari kehinaan hidup dan pembantaian thaghut maka tanpa jihad umat Islam tidak mungkin menang perjuangannya. Untuk menegakkan dienul Islam karena tidak dapat nasrullah akibatnya hidupnya diinjak-injak thaghut (Ba'asyir, 2014: 49)

Sesungguhnya kekalahan, pembantaian, pengusiran dan penghinaan yang menimpa muslimin di dunia termasuk di Indonesia sebab utamanya karena mereka meninggalkan Jihad. (Ba'asyir, 2014: 50). Jihad dalam pemahaman melawan orang-orang kafir Sehingga Ba'asyir begitu marah ketika ibadah I'dad yang merupakan persiapan untuk berjihad melawan kekuatan kafir di Jantho Aceh dianggap oleh pemerintah Indonesia sebagai tindakan teror¹¹, Padahal menurut

¹¹ Baca buku Tadzkirah: Kasih Sayang Ulama terhadap bangsa dan Penguasa Negara Indonesia dari Presiden hingga Camat yang diterbitkan oleh oleh JAT Media Center yang disalah satu bagiannya berisi pembelaan terhadap syariat I'dad

saksi di pengadilan penduduk sekitar pegunungan Jantho Aceh tidak merasa di terror¹² Jihad dalam pandangan Ba'asyir fungsinya untuk membela agama Islam dari orang yang akan mengganggu dakwah dan pengamalan dinul Islam dan Jihad untuk membela negara dan tanah air dan jihad menurut beliau akan terus berjalan sampai hari kiamat.

Jihad itu akan tetap terus berjalan sampai hari qiyamat baik dengan adanya imam A'dham ataupun tidak, dengan Imam yang adil maupun dengan Imam yang fajir, Jihad *thalaby* (*offensif*) mengharuskan adanya imam dan jihad *difa'iy* (*defensif*) tidak harus adanya imama (Sariyah dawlami, 1432: 31-31)

Jihad Offensif atau menyerang hari ini bisa ummat Islam lakukan misalkan dengan Myanmar yang sudah membantai kaum muslimin di negara mereka. Adapula Jihad Defensif (Bela Negara) yaitu membela negara dan jika diserang kekuatan kafir, seperti jihadnya kaum muslimin palestina ketika diserang Israel maupun jihadnya kaum muslimin di Afganistan dan Irak ketika diserang oleh Amerika.

Dan menurut Ba'asyir jihad baik thalaby maupun Difa'iy akan terus terjadi sampai hari kiamat. Sebagaimana hadits Rasulullah:

“ Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang membela kebenaran, mendapatkan pertolongan Allah hingga datangnya kiamat “ (HR Muslim)

Rujukan

- Ba'asyir, Abu Bakar, *Metode Mengamalkan dan Menegakkan Dinul Islam Menurut pandangan Al Qur'an dan Sunnah*, Solo: 2006
- Ba'asyir, Abu Bakar. *Catatan dari penjara untuk mengamalkan dan menegakkan Dinul Islam*, Depok: Mushaf, 2006
- Ba'asyir, Abu Bakar. *Tadzkiroh: Nasihat dan peringatan karena Allah untuk parapenguasa Negara karunia Allah Indonesia yang berpenduduk mayoritas kaum muslimin*, Jakarta: JAT Media Center, 2012
- Ba'asyir, Abu Bakar, *Tadzkiroh Buku II: Nasihat dan peringatan kerena Allah kepada ketua MPR/DPR dan semua anggotanya yang mengaku muslim dan aparat thohut NKRI di bidang hukum dan pertahanan yang mengaku muslim*, Jakarta: JAT Media Center, 2012
- Ba'asyir, Abu Bakar. *Meluruskan makna La ilaaha illallah dan makna ibadah*, Jakarta: Hard Copy, 2013
- Ba'asyir, Abu Bakar. *Risalah Tauhid dan Iman*, Jakarta: Hard copy, 1432
- Ba'asyir, Abu Bakar, *Demokrasi adalah bisikan setan yang berperan menghancurkan tauhid dan iman*, Jakarta: Hard Copy, 2012
- Ba'asyir Abu Bakar. *Dakwah Islamiyah*, Jakarta: Hard Copy, 2012
- Ba'asyir, Abu Bakar. *Peranan Iman Jihad dan cirri - cirri mukmin yang benar Imannya*, Jakarta: JAT Media Center, 2014
- Awwas, Irfan Suryahadi, *Dakwah & Jihad Abu Bakar Ba'asyir*, Yogyakarta: Wihdah Press, 2003
- Solahudin. *NII sampai JI: Salafi Jihadisme di Indonesia*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2011
- Kato, Hisanori, *Islam di mata orang Jepang: Ulil, Gusdur sampai Ba'asyir*, Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2014
- Team Sariyah Dakwah wal I'lam Jamaah Ansharut Tauhid. *Aqidah dan Manhaj Kami: Buku panduan resmi Jamaah Ansharut Tauhid*, Jakarta: JAT Publishing, 1434
- Team Sariyah Dakwah wal I'lam Jamaah Ansharut Tauhid. *Risalah Amal Jama'i: Buku panduan resmi Jamaah Ansharut Tauhid*, Jakarta: JAT Publishing 1434
- Team Sariyah Dakwah wal I'lam Jamaah Ansharut Tauhid. *Mengenal Jamaah Ansharut Tauhid: Buku panduan resmi Jamaah Ansharut Tauhid*, Jakarta: JAT Publishing 1434
- Madjid, Nurcholis. *Islam doktrin dan peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1995
- Azra, Azyumardi. *Pergerakan politik Islam dari Fundamentalis, Modernisme hingga Post - Modernisme* Jakarta: Paramadina, 1996

¹² Keterangan didapat dari situs www.saveabb.com

- Effendi Bachtiar, *Islam dan Negara transformasi pemikiran dan praktik politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998
- Ma'arif, A.Syafi'i, *Islam dan masalah kenegaraan studi tentang percaturan dalam konstituante*, Jakarta: LP3ES
- Kamil, Sukron. *Islam dan Politik di Indonesia terkini*, Jakarta: PSOA UIN Jakarta, 2013__